

DAFTAR BACAAN

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law: Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan – Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
-, *Hukum Kepailitan Rapat-rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
-, *Hukum Kepailitan – Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011
- Huizink, J. B., *Insolventie* (alih bahasa: Linus Dolujawa), Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lieberman, Jethrow K. dan George J. Siedel, *The Legal Environment of Business*, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Muchsin, *Iktisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH “IBLAM”, Jakarta, 2004.
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia (edisi 2), Jakarta, 2010.

....., *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jogjakarta, 2001

Tumbuan, Fred BG, *Pembagian Kewenangan antara Kurator dan Organ2 Perseroan Terbatas*, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2014

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Yulianto, *Pembatasan Hak Bank Selaku Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Surabaya, 2017.

Jurnal dan Makalah

Azed, Abdul Bari, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia dan Pernyataan Pailit*, Makalah pada Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI Angkatan XVI, Jakarta, 2010.

Badruzaman, Mariam Darus, *Posisi Hak Tanggungan Dalam Hukum Jaminan Nasional*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional “Kesisapan dan Persiapan dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, pada tanggal 27 Mei 1996.

Bustoni, Abuyazid, *Proses Lelang dalam Kepailitan*, Solusi, Volume VI, Nomor 3, Palembang, September 2014

Khairandy, Ridwan, *Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-undang Kepailitan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum UII, Vol. 2 No 1 (Februari 2020).

Laman

<http://arsyad-shawir.blogspot.com/2011/jeni-jenis-kreditor-kepailitan.html>,
diunduh tanggal 27 Oktober 2019.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013